

ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TRIBUNNEWS.COM DI BALI UTARA TENTANG PENERAPAN KTP BALI SEBAGAI SYARAT PENGEMUDI BARU

¹M Ivan Tri O, ²Merry Fridha Tri Palupi, ³Irmasanthi Danadharta

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yannkhalifa00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi makna khalayak terhadap kebijakan penggunaan KTP Bali sebagai syarat administratif bagi pengemudi baru, sebagaimana diberitakan oleh media daring *Tribunnews.com*. Dengan latar meningkatnya perhatian masyarakat terhadap regulasi tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk resepsi masyarakat Bali Utara terhadap informasi yang disampaikan media. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri proses pemaknaan khalayak dengan menggunakan teori analisis resepsi dari Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi khalayak dapat dibagi menjadi tiga kategori pemaknaan *dominan, oposisi, dan negosiasi*. Audiens dalam kategori dominan sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan, menganggap berita tersebut informatif dan mendukung regulasi ini sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan mengutamakan ekonomi warga lokal. Sebaliknya, audiens dalam kategori oposisi menunjukkan diskriminatif terhadap informasi yang disajikan, merasa bahwa berita tersebut terlalu menggunakan kata-kata yang mengandung diskriminatif. Sementara itu, audiens dalam kategori negosiasi mengakui kelebihan regulasi ini tetapi juga mempertimbangkan efek dari regulasi ini. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika resepsi khalayak dalam konteks media digital, serta menekankan pentingnya memahami latar belakang sosial dan budaya audiens dalam analisis media. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan pembuat berita dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif terkait isu-isu kebijakan publik.

Kata kunci: Resepsi khalayak, Penerapan KTP Bali, *Tribunnews.com*.

Abstarc

*This study examines audience meaning construction regarding the implementation of the Bali ID Card as an administrative requirement for new drivers, as reported by the online news platform in *Tribunnews.com*. Against the backdrop of increasing public attention to this regulation, the research aims to explore the reception of North Balinese audiences toward the media's portrayal. A qualitative approach is employed to analyze the audience's interpretation process using Stuart Hall's reception theory. The findings reveal that audience reception can be categorized into three types of meaning: dominant, negotiated, and oppositional. Audiences in the dominant category fully accept the conveyed message, viewing the news as informative and supporting the regulation as a solution to reduce traffic congestion and prioritize local economic interests. Meanwhile, audiences in the negotiated category acknowledge the regulation's benefits but also consider its potential side effects. Conversely, audiences in the oppositional category perceive discriminatory undertones in the news coverage, criticizing its use of biased language. This study provides valuable insights into audience reception dynamics in digital media contexts and emphasizes the importance of understanding socio-cultural backgrounds in media analysis. The findings are expected to serve as a reference for future researchers and news producers in developing more effective communication strategies regarding public policy issues.*

Keywords: Audience reception, Bali id card enforcement, *Tribunnews.com*.

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia maupun mancanegara karena keindahan alamnya yang menakjubkan serta budayanya yang kaya dan autentik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja di Bali pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 2,71 juta orang, meningkat 23,86 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja di Bali. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada pekerja asli Bali, tetapi juga dipengaruhi oleh banyaknya pendatang yang datang ke Bali untuk bekerja.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, Bali menghadapi tantangan dalam mengelola sistem transportasi agar tetap efisien, adil, dan berkelanjutan. Salah satu isu yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah usulan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bali sebagai syarat pendaftaran bagi pengemudi baru. Kebijakan ini menjadi salah satu topik yang menarik perhatian, terutama dalam kaitannya Dengan keseimbangan antara perebutan akses ekonomi dan isu kesejahteraan (Tribun Bali, 2024).

Media kemudian ramai mengangkat berita mengenai kebijakan ‘penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru’. Media tentu telah sangat mengerti isu-isu yang menarik perhatian publik kemudian semakin gencar membuat berita mengenai kebijakan penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru tersebut. Banyaknya media yang mempublikasikan berita mengenai insiden tersebut membentuk berbagai perspektif dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan adanya ekspos dari media massa, suatu peristiwa bisa menjadi sangat fenomenal dan mengehebohkan (Tan & Alfrin Aladdin, 2018).

Melalui studi ini, peneliti tertarik untuk meneliti khalayak media dan ingin mengetahui bagaimana resepsi khalayak Bali Utara terhadap Kebijakan ini yang diberitakan di Tribunnews.com. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis resepsi oleh Stuart Hall untuk mengukur pemaknaan dan pemahaman khalayak media terhadap teks yang nantinya akan dibaca.

Untuk mendapatkan reaksi penerimaan, pemahaman, dan interpretasi individu atas teks, penulis akan melakukan wawancara terhadap informan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian (Hadi, 2008 dalam Dwiputra, 2021). Penulis juga sudah mengumpulkan beberapa pemberitaan terkait pemberitaan penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru dan tujuh informan yang sesuai dengan kriteria.

Teori resepsi mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual mempengaruhi bagaimana khalayak pemirsa atau pembaca media. Faktor kontekstual termasuk elemen identitas khalayak, persepsi pembaca atas pemberitaan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, atau lingkungan, dan dapat bervariasi tergantung pada situasi atau latar belakang tertentu.

Analisis resepsi juga dapat dikatakan sebagai penanda suatu media maupun suatu pengalaman pada suatu peristiwa dan kejadian yang di dalamnya terdapat pesan-pesan yang akan disampaikan. Agar audiens melihat isi pesan yang disampaikan spesifik dengan apa yang dilihat menjadi obyek analisis yang empiris, maka fungsi resepsi adalah dengan memberikan saran (Argani, 2014 dalam Dwiputra, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Pertama peneliti akan membahas penelitian terdahulu dengan judul “Analisis resepsi khalayak terhadap pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode analisis resepsi oleh Stuart Hall. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah in-depth-interview atau wawancara mendalam. Hasilnya, Mayoritas informan berada dalam posisi negosiasi, artinya mereka memahami dan menerima sebagian pesan dari media, namun tetap bersikap kritis terhadap isi berita. Ada juga yang berada dalam posisi dominan, yaitu mereka percaya penuh dan menerima informasi tanpa keraguan. Tingkat pendidikan, literasi media, kepercayaan terhadap sumber, serta pengalaman pribadi mempengaruhi posisi makna yang diadopsi oleh khalayak. Secara umum, media cukup efektif dalam mempengaruhi persepsi masyarakat, tetapi tingkat kritis dan verifikasi terhadap informasi tetap penting untuk memastikan pemahaman yang akurat.

Posisi dominan (*dominant hegemonic position*) Hall menjelaskan hegemoni dominan sebagai situasi dimana media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Apa yang disampaikan media secara kebetulan juga disukai oleh khalayak. Misalnya, khalayak menginterpretasikan pesan iklan di media melalui cara-cara yang dikehendaki media, maka media, pesan, dan khalayak sama-sama menggunakan ideologi dominan.

Posisi negosiasi (*negotiated position*) posisi negosiasi adalah dimana khalayak secara umum menerima ideologi dominan, tetapi menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, media memberitakan tentang kebijakan ini bisa jadi ada khalayak setuju dengan kebijakan tersebut tapi tidak sepenuhnya yakin akan pemberitaan itu.

Posisi oposisi (*oppositional position*) cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi, yang terjadi ketika khalayak kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif. Khalayak menolak maka yang dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berjudul “Analisis Resepsi Khalayak Tribunnews.com di Bali Utara Tentang Penerapan KTP Bali Sebagai Syarat Pengemudi Baru”. Analisis ini menyoroti bagaimana khalayak memaknai isi media dengan membandingkan respons mereka terhadap teks media. Teori yang digunakan adalah Encoding-Decoding Stuart Hall, yang membagi posisi khalayak menjadi dominan, negosiasi, dan oposisi. Penelitian ini berpijak pada paradigma konstruktivis untuk memahami pemaknaan khalayak terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis resepsi sendiri bisa dibilang sebagai metode penelitian yang baru untuk melihat bagaimana pandangan khalayak terhadap media. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tujuh informan dari berbagai latar belakang untuk mengetahui bagaimana penerimaan mereka terhadap kebijakan penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru. Seorang pengemudi ojek online bernama Gusty berada pada posisi dominan, ia menyampaikan bahwa isi pemberitaan mengenai penerapan KTP Bali sebagai syarat pendaftaran pengemudi baru sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Ia merasa kebijakan ini memberikan dampak positif, khususnya dalam mengurangi tingkat persaingan antar pengemudi dalam mencari pelanggan (client). Dengan adanya pembatasan ini, menurut Gusty, peluang mendapatkan penumpang bagi warga lokal menjadi lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan masyarakat lokal dalam hal kesempatan kerja, terutama di sektor transportasi daring seperti ojek online.

Mahasiswa bernama Baswara mendukung pemberitaan dan penerapan KTP Bali karena dinilai jelas, adil, dan menguntungkan driver lokal. Ia menilai kebijakan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali dan melindungi budaya lokal dari pengaruh luar, serta menekankan perlunya dukungan konkret dari pemerintah.

Pandangan berikutnya juga disampaikan oleh seorang mahasiswa bernama Robi Alwafa, Ia menilai bahwa penerapan ini merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga reputasi wilayahnya, sekaligus melindungi wisatawan dari risiko kriminalitas yang dapat muncul dari pihak-pihak yang tidak terkontrol. Ia menekankan bahwa jika kasus-kasus seperti ini terus dibiarkan, lambat laun Bali akan kehilangan daya tariknya. Masyarakat internasional bisa kehilangan kepercayaan terhadap keamanan Bali sebagai destinasi wisata. Pandangan mahasiswa berikutnya juga disampaikan oleh Jeananta, Menurutnya, kondisi Bali saat ini sudah jauh berbeda. Ia merasa bahwa rasa aman dan ketertiban yang dulu ia rasakan perlahan mulai memudar, salah satunya akibat masuknya pendatang secara bebas tanpa regulasi yang jelas. Ia menyebut bahwa para pendatang baik turis asing maupun warga dari luar Bali banyak yang tidak menghormati budaya setempat, bahkan kerap menimbulkan keresahan sosial hingga tindakan kriminal. Penerapannya, menurut mahasiswa ini, menjadi sangat krusial dalam konteks menjaga tatanan sosial dan budaya Bali agar tidak terus menerus dirusak.

Pandangan terakhir yaitu disampaikan oleh Adi saputra yang bekerja sebagai kitchen staff di sebuah hotel di Bali, Menurutnya, penerapan ini adalah bentuk upaya pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada masyarakat lokal. ia menyatakan bahwa tanpa penerapan semacam ini, dikhawatirkan masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di tanahnya sendiri. Banyak warga asli Bali, terutama yang bekerja di sektor pariwisata dan transportasi, kini harus bersaing keras bahkan kadang kalah dengan pekerja luar yang jumlahnya terus bertambah.

Berdasarkan tanggapan dari lima informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan KTP Bali sebagai syarat pendaftaran pengemudi baru mendapat dukungan kuat dari kalangan masyarakat lokal, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam sektor transportasi dan pariwisata. Informan seperti Gusty dan Adi Saputra menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam menciptakan persaingan kerja yang lebih adil serta membuka peluang lebih besar bagi warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka memandang bahwa tanpa regulasi semacam ini, masyarakat Bali terancam terpinggirkan di tanahnya sendiri oleh lonjakan pendatang yang tidak terkendali.

Sementara itu, kalangan mahasiswa seperti Baswara, Robi Alwafa, dan Jeananta menekankan dimensi strategis dan kultural dari kebijakan tersebut. Mereka memandang bahwa pembatasan berbasis identitas lokal bukan sekadar soal lapangan kerja, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap keamanan, ketertiban sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya Bali. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga integritas sosial dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata yang aman, tertib, dan berkarakter. Dengan demikian, penerapan KTP Bali dilihat bukan hanya sebagai kebijakan administratif semata,

melainkan juga sebagai langkah preventif dan afirmatif dalam menjawab tantangan demografis, ekonomi, dan kultural yang dihadapi Bali saat ini.

Seorang pengemudi mobil, bernama Fadil menyatakan bahwa ia berada pada posisi negosiasi terhadap penerapan yang mewajibkan penggunaan KTP Bali sebagai syarat pendaftaran pengemudi baru. Ia mengakui bahwa jika melihat kondisi Bali saat ini, penerapan tersebut memang memiliki sisi positif dan layak untuk diterapkan, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan lapangan kerja bagi warga lokal. Namun, di sisi lain, Fadil juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam penerapan kebijakan ini, khususnya bagi para pendatang dari luar Bali yang ingin mencari pekerjaan, terutama di sektor transportasi seperti driver. Fahmi, pemilik toko koran, awalnya terkejut dengan judul berita yang menurutnya terkesan diskriminatif terhadap pendatang. Meski merasa tidak nyaman, ia tidak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut, namun menilai perlu ada kajian lebih lanjut agar tidak merugikan pendatang yang sudah lama bekerja di Bali.

Seorang desa adat juga mengemukakan pandangannya dalam posisi negosiasi, dari sudut pandang pecalang ini, penerapannya dapat membantu menekan laju pertumbuhan pengemudi dari luar Bali, sehingga penggunaan ruang jalan dan ketertiban masyarakat dapat lebih dikendalikan. Sebagai wilayah yang memiliki sistem adat dan budaya yang kuat, Bali perlu memastikan bahwa penduduk atau pekerja yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya benar-benar memiliki komitmen dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal. Namun demikian, ia juga tidak menutup mata terhadap keberatan yang datang dari sebagian kalangan.

Seorang pemandu wisata bernama Azmi menyampaikan pendapatnya terkait pemberitaan media mengenai penerapan KTP Bali sebagai syarat pendaftaran pengemudi baru. Menurut Azmi, pemberitaan yang ia baca terkesan terlalu memihak kepada pemerintah, tanpa menampilkan sisi kemanusiaan dari kebijakan tersebut. Ia merasa bahwa media belum mampu menyuarakan keresahan atau dampak kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya mereka yang bukan warga asli Bali. Pendapat serupa juga disampaikan oleh seorang driver ojek online yang berasal dari tasikmalaya bernama Pandi. Ia merasa bahwa pemberitaan yang ada cenderung tidak berpihak kepada kelompok pendatang seperti dirinya. Dalam pandangannya, media seolah-olah hanya menyoroti sudut pandang pemerintah atau warga lokal, tanpa mempertimbangkan nasib para pendatang yang juga menggantungkan hidup di Bali.

Informan lainnya, Kalya, juga mengungkapkan rasa kecewa yang serupa. Ia merasa bingung dan kesal terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini mengandung unsur diskriminatif karena membatasi kesempatan bagi warga luar Bali. Kalya juga menyayangkan bahwa media tidak banyak mengangkat suara dan perspektif dari para pendatang, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam ruang publik.

Posisi Dominan

a) Informan Gusty

Informan ini punya latar belakang menjadi ojek online, berusia 20 tahun. Informan ini cenderung ada di posisi dominan. Dirinya mengaku menerima setiap pemberitaan yang ada di tribunnews.com. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Gusty dalam berita Penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru menghegemoni dirinya. Pendapat Gusty cenderung menyetujui apa yang diberitakan oleh tribunnews.com. Gusty merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan soal pemberitaan penerapan KTP Bali Sebagai Syarat pengemudi baru ini.

b) Informan Baswara

selanjutnya adalah baswara, Informan ini punya latar belakang menjadi mahasiswa teknik lingkungan di universitas brawijaya. Informan ini juga cenderung ada di posisi dominan. Bas mengaku menerima pemberitaan yang ada di tribunnews.com. Jawaban-jawaban pada saat wawancara menunjukkan ia berada pada posisi dominan.

c) Informan Jeananta

Jeananta dengan berlatar belakang menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Undiknas, ia cenderung pada posisi dominan, Jeananta menerima pemberitaan tribunnews.com serta jawaban-jawaban pada saat wawancara menunjukkan ia pada posisi dominan

d) Informan Robi

Sebagai mahasiswa, ia menanggapi penerapan ini dengan cenderung pada posisi dominan, ia menerima sepenuhnya penerapan ini, hal ini dapat disimpulkan dari jawaban-jawaban pada saat wawancara.

e) Informan Adi Saputra

Sebagai seorang pekerja *kitchen staff* di salah satu hotel di Bali, ia menunjukkan kecenderungan pada posisi dominan dengan menerima sepenuhnya penerapan kebijakan ini. Hal tersebut tercermin dari pernyataan-pernyataannya selama sesi wawancara.

Posisi Negosiasi

a) Informan Fadil

Informan ini adalah seorang *driver* mobil online maupun offline berusia 25 tahun. Temuan yang bisa didapatkan adalah bahwa ia mengikuti tentang kebijakan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru ini. Ketika melakukan wawancara, informan I disimpulkan berada pada posisi ideologi negosiasi. Dirinya mendukung terhadap kebijakan ini tetapi ia juga mempertimbangkan terhadap kebijakan ini.

b) Informan Fahmi

Kemudian, informan II adalah seorang pria berusia 46 tahun, seorang wiraswastawan. Tidak berbeda jauh dengan informan Fadil juga dalam status negosiasi ketika diperhadapkan pada pemberitaan penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru. Ia percaya dengan berita-berita berupa data tapi kurang setuju kalau muncul pemberitaan yang di dalam beritanya mengandung kalimat yang mengandung kontroversi.

c) Informan Made

Informan made merupakan seorang desa adat, ia mengemukakan tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh fadil dan fahmi yang sama-sama dalam posisi negosiasi. Ia memahami kedua sisi tersebut, dan menyampaikan bahwa penerapannya memang harus dilakukan namun harus dijalankan secara fleksibel dan inklusif.

Posisi Oposisi

a) Informan Azmi

Informan I, seorang pemandu wisata, berada pada posisi oposisi. Ia menolak pemberitaan Tribunnews.com dan merasa pernyataan Azmi dalam berita tersebut tidak mewakili pandangannya. Menurutnya, kebijakan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru tidak adil dan mempersulit orang luar Bali yang ingin menjadi ojek online.

b) Informan Pandi

Kemudian, informan II adalah seorang pria berusia 20 tahun, ia merupakan seorang ojek online yang bukan asli orang Bali melainkan orang Tasikmalaya. Ia merasa bahwa pemberitaan tribunnews.com cenderung tidak berpihak kepada kelompok pendatang seperti dirinya.

c) Informan Kalya

Lalu, ada informan III. Seorang HRD berusia 20 tahun. Informan ini berada pada posisi oposisi. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Kalya dalam berita Penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru mengoposisi dirinya, kebijakan ini mengandung unsur diskriminatif karena membatasi kesempatan bagi warga luar Bali. Kalya juga menyangkan bahwa media tidak banyak mengangkat suara dan perspektif dari para pendatang, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam ruang publik.

Penutup

Berdasarkan data-data yang dipaparkan di atas terlihat bahwa pemberitaan mengenai Penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru mendapat sambutan yang buruk dari khalayak. Sebagian besar informan ada di posisi oposisi, itu artinya masyarakat tidak menerima sebagian dari setiap pemberitaan soal Penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru. Di sisi lain, ada juga informan yang berada pada posisi dominan, ini berarti bahwa informan ini percaya penuh pada pemberitaan Penerapan KTP Bali sebagai syarat pengemudi baru.

Daftar Pustaka

Dwiputra, K. O. (2021). *Analisis resepsi khalayak terhadap pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com*.

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>

Tan, S., & Alfrin Aladdin, Y. (n.d.). *ANALISIS RESEPSI PEMBACA TRIBUNNEWS.COM DARI KALANGAN MAHASISWA/I UNIVERSITAS INDONESIA TERHADAP INSIDEN "KARTU KUNING" KETUA BEM UI* (Vol. 12, Issue 1). <http://www.tribunnews.com/nasional/2018>

Tribun Bali. (2024, December 11). *MARAK Ojol Plat Non DK, Driver Pariwisata Bali Minta Pembatasan, Parta: Jangan Hanya Bawa Polusi!* *Tribun Bali*, 1–2.

<https://bali.tribunnews.com/2024/12/11/marak-ojol-plat-non-dk-driver-pariwisata-bali-minta-pembatasan-parta-jangan-hanya-bawa-polusi>